

**PERJANJIAN 7 JANUARI 1681 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK EKONOMI
DI KERAJAAN CIREBON (1681 M-1755 M)**

Firlianna Tiya Deviani

Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

firliannatiya.d@gmail.com

ABSTRAK

Sejarah mencatat bahwa dahulu Cirebon hanyalah sebuah desa kecil di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Pangeran Cakrabuana merupakan perintis berdirinya Kerajaan Cirebon. Dalam perkembangan selanjutnya, Cirebon benar-benar menjadi sebuah kerajaan yang besar dan berdaulat di bawah kepemimpinan Sunan] Gunung Jati. Kepemimpinan pasca Sunan Gunung Jati di Kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh para penerusnya. Hingga pada suatu saat, intervensi pihak asing perlahan merongrong pertahanan Cirebon, dimulai dari penguasaan pihak Mataram, Banten, dan VOC. Dari ketiganya, VOC inilah yang mampu menanamkan pengaruhnya dengan kuat di Cirebon melalui sebuah perjanjian. Perjanjian 7 Januari 1681 adalah sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 Masehi di Kerajaan Cirebon. Perjanjian tersebut dilakukan antara tiga Pangeran dari Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta (ketiganya merupakan putera dari Panembahan Girilaya) dengan pihak VOC. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah melemahnya kekuasaan politik di Kerajaan Cirebon, VOC selalu campur tangan dalam setiap kebijakan ekonomi, dan kebebasan manusia Cirebon menjadi hilang.

Kata Kunci: Kerajaan Cirebon, VOC, Perjanjian, dan Implikasi.

PENDAHULUAN

Cirebon merupakan salah satu wilayah yang terletak di pesisir Pulau Jawa dengan kondisi geografis yang menguntungkan. Cirebon terletak di jalur pantai utara yang berbatasan langsung dengan wilayah yang sekarang disebut dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini membuat terjadinya interaksi di antara dua kebudayaan yang ada di kedua wilayah tersebut yaitu Kebudayaan Jawa dengan Kebudayaan Sunda, sehingga lahirlah sebuah kebudayaan yang unik dan khas. Di

sisi lain, Cirebon juga menjadi wilayah yang secara langsung dilewati jalur perdagangan antarpulau bahkan internasional pada abad ke-15 dan 16 dengan ditandai adanya pelabuhan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal baik untuk perdagangan ataupun pelayaran. Selain wilayah pesisir, Cirebon juga memiliki wilayah pedalaman yang subur untuk kegiatan pertanian yang hasilnya akan diperjualbelikan dalam perdagangan internasional.

Pendirian Cirebon tidak bisa terlepas dari peranan yang dilakukan Pangeran Cakrabuana. Dia terus melakukan pengembangan-pengembangan di Caruban (sebelum disebut Cirebon) hingga status daerah ini yang semula pakuwon berubah menjadi nagari (kerajaan). Hal ini tercermin dengan adanya pengakuan dari Prabu Siliwangi terhadap pendirian Nagari Caruban yang didirikan oleh puteranya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Ketika itu Prabu Siliwangi mengirimkan utusannya yang dipimpin oleh Tumenggung Jagabaya untuk memberikan tanda keprabuan kepada puteranya dan menerima tanda kekuasaan (*Anarimakna Kacakrawartyan*) otonomi kerajaan. Pangeran Cakrabuana pun diberi gelar resmi kerajaan yaitu Sri Mangana.¹

Masuk dan berkembangnya Islam di daerah Jawa Barat semakin kuat setelah Syarif Hidayatullah² (keponakan Pangeran Cakrabuana) datang ke Cirebon. Pada tahun 1470 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon dan menetap di Bukit Amparan Jati sebagai guru Agama Islam. Kemudian Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya atas Cirebon kepada Syarif Hidayatullah (Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati), kemenakan sekaligus menantunya pada tahun 1479 Masehi.

Setelah Sunan Gunung Jati memegang pemerintahan di Cirebon, ia memproklamirkan bahwa Cirebon berdiri sendiri bebas dari ikatan dengan pemerintah pusat di Pakuan Pajajaran. Cirebon sebagai negara yang merdeka dan otonom ditandai dengan penghentian pemberian upeti kepada kerajaan tersebut. Sejalan dengan usaha penyebaran Agama Islam, Susuhunan Jati meluaskan wilayah kekuasaan Cirebon ke daerah pedalaman. Akan tetapi karena perhatiannya tertuju pada pengembangan Agama Islam, maka Susuhunan Jati mempercayakan urusan

¹ Yoseph Iskandar dkk, 2000, *Negara Gheng Islam Pakungwati Cirebon*, Bandung: Padepokan Sapta Rengga hlm. 93

² Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1450 Masehi. Di usia 20 tahun ia berniat menjadi guru Agama Islam, lalu ia pergi menuntut ilmu ke Makkah dan Baghdad sebelum berangkat ke Jawa. Syarif Hidayatullah tidak berniat menjadi raja, karena itu kedudukannya sebagai raja di Mesir diberikan kepada adiknya, Syarif Nurullah. Dalam perjalanannya menuju Cirebon, Syarif Hidayatullah singgah di beberapa tempat penyebaran Agama Islam yaitu Gujarat, Pasai, Banten, dan Gresik. (Atja, 1986, *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*, hlm. 36)

pemerintahan kepada putranya, yakni Pangeran Pasarean (1528). Walaupun telah mewakili Susuhunan Jati selama kurang lebih 18 tahun, tetapi ia tidak sampai menduduki tahta kerajaan karena tewas di Demak pada tahun 1546 Masehi. Selanjutnya bidang pemerintahan diwakili oleh Fatahillah, menantu Susuhunan Jati. Pada tahun 1568 Masehi, Susuhunan Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Sembung. Dengan meninggalnya Susuhunan Jati, maka Fatahillah naik tahta. Ia memerintah Cirebon secara resmi sebagai raja.³

Fatahillah memerintah Cirebon sampai meninggalnya pada tahun 1570 Masehi. Oleh karena tidak ada calon lain sepeninggal Fatahillah, maka tahta kerajaan jatuh ke tangan cucunya yaitu Pangeran Emas, putra tertua Pangeran Dipati Carbon atau cicit Susuhunan Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu (I). Ia memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun (1570-1649). Setelah Panembahan Ratu wafat, pemerintahan di Cirebon diserahkan kepada cucunya yang bernama Pangeran Rasmi dengan gelar Panembahan Adiningkusuma (Panembahan Ratu II).⁴ Setelah kematiannya, Panembahan Ratu II lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Girilaya.

Penobatan Panembahan Ratu II disambut baik oleh Sunan Amangkurat I (Raja Mataram periode 1645-1677) karena Panembahan Ratu II adalah menantu Sunan Amangkurat I. Tahun 1650, beberapa lama setelah penobatan Panembahan Ratu II menjadi raja Cirebon, Sunan Amangkurat I mendesak Panembahan Ratu II untuk menyerang Banten, hal tersebut ditempuh setelah upaya diplomatik yang dilakukan oleh Mataram untuk menguasai Banten gagal. Akan tetapi pasukan Banten dapat memukul mundur pasukan Cirebon. Untuk menanamkan pengaruhnya terhadap Cirebon, maka masih di tahun 1650 juga Sunan Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II disertai dua orang putranya yakni Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berkunjung ke Keraton Mataram. Namun, setelah mereka berada di sana, mereka tidak diizinkan kembali ke Cirebon. Hingga wafatnya Panembahan Ratu II pada tahun 1662 Masehi, ia dimakamkan di bukit Girilaya (sebelah timur Imogiri, kompleks pemakaman keluarga Kerajaan Mataram, Yogyakarta). Selama Panembahan Ratu II ditawan di Mataram, pemerintahan di Cirebon dijalankan oleh Pangeran Wangsakerta (putera Panembahan Girilaya), akan tetapi tetap mendapat pengawasan dan tekanan dari

³ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.cit.*, hlm. 63-65. Fatahillah dimungkinkan menjadi raja selain karena kemampuannya serta jasanya dalam memerintah Cirebon mewakili Susuhunan Jati, juga karena putera-putera dari Susuhunan Jati sudah wafat sebelum Susuhunan Jati wafat, yakni Pangeran Pasarean, Pangeran Jayakelana, Pangeran Bratakelana, sedangkan Pangeran Sabakingkin (Hasanuddin) memerintah di Banten sejak tahun 1552 Masehi.

⁴ *Ibid.*, hlm 66.

wakil-wakil penguasa Mataram yang ditempatkan di Cirebon.⁵ Pejabat yang menjadi wakil Mataram di Cirebon, salah satunya adalah Martadipa yang merupakan seorang Syahbandar Cirebon sekitar tahun 1677 Masehi, dan di tahun ini pula Keraton Mataram mendapat serangan dari Pasukan Trunojoyo.

Pada tahun 1677 terjadi serangan besar-besaran pasukan Trunojoyo terhadap Keraton Mataram, ia berhasil menguasai Keraton Mataram selama empat hari (24-28 Juni 1677). Atas permintaan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) karena ia membantu Pasukan Trunojoyo, maka Pangeran Trunojoyo membebaskan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya dari tahanan Mataram. Selanjutnya Pangeran Trunojoyo membawa kedua Pangeran tersebut ke Kediri untuk diserahkan kepada Kiai Nara yang kemudian dibawa ke Banten, sejak saat itu Cirebon berada di bawah pengaruh Banten. Kedua pangeran tiba di Banten awal Oktober 1677. Sultan Ageng Tirtayasa menyambut kedua pangeran itu dengan upacara kebesaran sebagai tanda penghormatan, disaksikan oleh Pangeran Wangsakerta. Dalam upacara itu, pangeran-pangeran Cirebon mendapat anugerah dari sultan. Sebelum ketiga pangeran kembali ke Cirebon, mereka dilantik oleh Sultan Banten menjadi penguasa di Cirebon.⁶ Akan tetapi penganugerahan Sultan tidak disertai dengan penetapan wilayah kekuasaan yang jelas bagi masing-masing Pangeran, hal ini menjadikan konflik di antara ketiga Pangeran.

Konflik internal bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut agar tahta kerajaan Cirebon jatuh kepadanya, karena ia beranggapan sebagai pewaris yang sah. Lalu ia menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yaitu Van Dick untuk meminta bantuan kompeni. Keinginan Pangeran Martawijaya tentunya ditolak oleh Pangeran Kartawijaya, karena ia dan kakaknya sama-sama dinobatkan sebagai sultan Cirebon. Kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Sultan Banten. Sementara itu, Pangeran Wangsakerta pun menuntut untuk berkuasa di Cirebon, karena ketika ayah dan kedua kakaknya ditawan di Mataram, dialah yang menjalankan pemerintahan Kerajaan Cirebon (1650-1677 M). Konflik internal memberikan peluang pada pihak luar yaitu VOC untuk melakukan intervensi. Dengan dalih akan memberikan perlindungan kepada Cirebon dari segala gangguan

⁵ A. Sobana Hardjasaputra, dkk, 2011, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*, Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, hlm. 87-89.

⁶ *Ibid.*, hlm. 90-91.

yang mengancam, maka ditandatangani perjanjian persahabatan antara VOC dan para Sultan Cirebon pada tanggal 7 Januari 1681.⁷

Jika dilihat dari isi Perjanjian 7 Januari 1681 berimplikasi bahwa sejak saat itu Cirebon sudah tidak lagi menjadi negara yang berdaulat, karena tidak lagi mandiri baik secara politik maupun ekonomi. Secara politik para sultan Cirebon masih memiliki gelar sebagai sultan akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kompeni. Harga komoditi ekspor yang bersumber dari alam Cirebon ditentukan pula oleh kompeni demi sebesar-besarnya keuntungan yang mereka dapatkan dari sektor ekonomi. Di samping itu, salah satu persyaratan perjanjian yang menyangkut sektor perekonomian adalah kompeni berhak untuk membangun benteng (loji) di Cirebon.

Tulisan ini secara umum berusaha untuk mengungkapkan bagaimana peristiwa Perjanjian 7 Januari 1681 dapat terjadi dan apa saja implikasi yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut di Kerajaan Cirebon.

PERJANJIAN 7 JANUARI 1681

Tahun 1596 umum dikenal –setidaknya oleh Sejarawan Eropa, sebagai tahun yang menjadi tanda kedatangan armada Belanda pertama di perairan Nusantara. Armada penjelajahan Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah sebelumnya singgah di beberapa pelabuhan dan mendapat gambaran awal mengenai topografi (keadaan muka bumi pada suatu daerah) juga perdagangan di Asia, sejumlah pedagang berkebangsaan Eropa itu mendirikan “*Serikat Perseroan Hindia Timur*” (*Vereenigde Oostindische Compagnie* atau disebut VOC) pada tahun 1602. VOC adalah sebuah golongan kuat yang mengontrol perdagangan Belanda tidak hanya di Nusantara saja, tetapi juga di Srilanka dan kawasan yang membentang mulai dari Tanjung Harapan sampai ke Jepang. Perseroan ini dipimpin oleh sebuah dewan persero “*de XVII Heeren*” atau “*ke-17 Tuan-tuan*” di Amsterdam hingga akhir abad ke-18. Kekuasaan setempat berada di tangan seorang Gubernur Jenderal yang bertanggungjawab atas setiap perundingan serta transaksi dagang, hubungan dengan Pangeran-Pangeran Asia, dan setiap tahun bertugas melakukan pengiriman armada ke Belanda yang berisi penuh dengan produk-produk berharga.⁸

⁷ Zaenal Masduqi, 2011, *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*, Cirebon: Nurjati Press, hlm. 24

⁸ Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 61

Peletak dasar kolonialisme VOC di Nusantara (Indonesia) adalah J.P. Coen. Ia merupakan Gubernur Jenderal pada tahun 1619-1623 dan 1627-1629 yang mendirikan Kota Batavia pada tahun 1619 dan menjadikannya pusat kegiatan VOC di Asia. Dahulunya kota ini bernama Jayakarta yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Banten. Cara VOC mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara, antara lain:

1. Berupaya merebut pasaran produksi pertanian yakni dengan cara memonopoli, seperti memonopoli rempah-rempah di Maluku dan kopi di daerah Priangan;
2. Tidak ikut serta dalam kegiatan produksi, jadi cara memproduksi hasil pertanian diserahkan kepada pribumi;
3. Karena kekuatan fisiknya yang masih terbatas, maka VOC hanya menduduki wilayah-wilayah yang strategis;
4. VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, namun terbatas pada upaya-upaya mengumpulkan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli;
5. Untuk memperoleh hasil bumi, VOC masih menggunakan alat tukar umumnya berupa barang. Uang masih terbatas hanya dipakai di daerah pantai saja dan VOC merupakan pihak yang lebih menentukan harga;
6. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional (pribumi) tetap dipertahankan. Hal ini berarti VOC menggunakan sistem *indirect rule*.⁹

Cirebon sebagai kota pelabuhan dan kerajaan yang berdaulat tidak luput dari interaksi dengan VOC. Menurut Jan P. Coen pada tanggal 10 Oktober 1616 yang dikutip dalam Laporan Penelitian *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas* diberitakan bahwa Cirebon bersama Banten, Jayakarta dan Jepara adalah wilayah-wilayah yang ramai untuk melakukan perdagangan di Pulau Jawa. Dari Cirebon dihasilkan beras dengan kualitas baik, minyak, kacang-kacangan, bawang putih, dan lain-lain. Ketika VOC di Batavia kekurangan beras yakni pada tanggal 22 Agustus 1617, untuk menanggulangi masalah tersebut didatangkan beras dari Cirebon. Kemudian pada pertengahan tahun 1619, setiap hari banyak kapal dari Cirebon yang tiba di Batavia dengan memuat banyak barang. VOC berharap supaya hal tersebut terus meningkat hingga bisa menguntungkan Batavia. Oleh karena itu, hubungan antara Cirebon dengan VOC tampak semakin jelas dan selaras dengan tujuan VOC untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari perdagangan di Nusantara.¹⁰

⁹ G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 16-17

¹⁰ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 137

Di sisi yang lain, peristiwa pemberontakan Raden Trunajaya yang terjadi di Mataram membuat dua putera Panembahan Girilaya berhasil dibebaskan berkat persekutuan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Raden Trunajaya sehingga mereka dapat dibawa ke Banten. Kemudian oleh Sultan Banten ketiga putera Panembahan Girilaya dianugerahi gelar sultan dan membuat Cirebon terpecah menjadi tiga kekuasaan. Peristiwa ini menjadikan Cirebon sebagai sasaran empuk bagi VOC yang tidak pernah berhenti mengawasi Cirebon dalam rangka mencari peluang untuk bisa membuat Cirebon berada dalam penguasaan VOC. Peluang yang tepat hanya akan didapat jika ketiga Pangeran Cirebon tersebut tidak lagi kompak dalam suatu hal akibat perbedaan kepentingan di antara mereka. Sedangkan menjaga kekompakan bukanlah suatu perkara yang gampang. Akhirnya, karena perbedaan kepentingan serta ketiga pangeran memiliki minat yang besar menjadi sultan maka terpecahnya Kerajaan Cirebon menjadi tiga kekuasaan merupakan sebuah keniscayaan.¹¹

Ketika Sultan Ageng Tirtayasa melantik tiga pangeran Cirebon di Banten, pada saat yang sama penobatan tersebut tidak disertai dengan pembagian wilayah kekuasaan yang tetap. Hal tersebut menimbulkan terjadinya konflik di antara mereka. Konflik internal bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut agar tahta kerajaan Cirebon jatuh kepadanya, karena ia beranggapan sebagai pewaris yang sah. Lalu ia menyampaikan keinginannya kepada utusan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) yaitu Van Dick untuk meminta bantuan kompeni. Keinginan Pangeran Martawijaya ditolak oleh Pangeran Kartawijaya, karena ia dan kakaknya sama-sama dinobatkan sebagai sultan Cirebon. Kemudian Pangeran Kartawijaya meminta perlindungan kepada Sultan Banten. Sementara itu, Pangeran Wangsakerta pun menuntut untuk berkuasa di Cirebon, karena ketika ayah dan kedua kakaknya ditawan di Mataram, dialah yang menjalankan pemerintahan Kerajaan Cirebon (1650-1677 M). Untuk mengatasi konflik yang tidak mencapai kesepakatan itu, maka dibuatlah suatu perjanjian persahabatan di antara ketiga pangeran Cirebon di mana VOC bertindak sebagai penengah.¹² Perjanjian persahabatan ini ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681

¹¹ *Ibid.*, hlm. 151

¹² A.Sobana Hardjasaputra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 103-105. Senada dengan versi lain, dalam buku Sejarah Tatar Sunda Jilid 1 disebutkan bahwa penyebab terjadinya Perjanjian 7 Januari 1681 karena adanya persaingan di antara pejabat tinggi Kerajaan Cirebon. Bahkan sampai menjurus kepada konflik dan persaingan keras. Untuk memadamkannya pihak Cirebon meminta bantuan kompeni (VOC) agar menyelesaikannya. Lihat, Nina H. Lubis dkk, 1956, *Sejarah Tatar Sunda Jilid 1*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, hlm. 197

Masehi, oleh sebab itu perjanjian antara tiga Pangeran Cirebon dengan pihak VOC lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian 7 Januari 1681.

Versi berikutnya menyebutkan bahwa perjanjian persahabatan terjadi karena pada awalnya Banten serta Cirebon hendak menyerbu Sumedang. Ketika itu Sumedang di bawah kepemimpinan Rangga Gempol III yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan kepada VOC. Tentu saja VOC bersedia karena memang mereka berambisi untuk menguasai Sumedang, apalagi daerah Priangan Barat yakni Bandung dan Cianjur sudah VOC kuasai yang diperoleh sebagai upah membantu Mataram melawan pemberontakan Trunajaya. Dalam membantu Sumedang, VOC mengirim utusan ke Cirebon yakni Jacob van Dyck dengan membawa ancaman bahwa gelar sultan yang diberikan oleh Sultan Banten tidak akan diakui apabila Cirebon membantu Banten untuk menyerbu Sumedang. Selain itu, Cirebon juga tidak boleh mengganggu wilayah VOC dan Cirebon tidak boleh berperang serta menghiraukan perintah dari Banten. Cirebon pun menanggapi ancaman VOC dengan mengatakan bahwa Cirebon tidak bermaksud hendak menyerbu Sumedang. Kiranya Cirebon melihat bahwa VOC lebih kuat daripada Banten dan jawaban ini merupakan salah satu alasan untuk bisa lepas dari pengaruh Banten.¹³

Mengetahui sikap Cirebon yang demikian, Banten geram dan mengirim pasukannya di bawah pimpinan Pangeran Kidul (saudara Sultan Ageng Tirtayasa) menyerbu wilayah-wilayah Cirebon. Ketiga Pangeran Cirebon sebagai penguasa ditawan oleh Banten. VOC segera melakukan sesuatu, mereka berhasil mengusir pasukan Banten dari Cirebon. Bantuan VOC terhadap suatu kerajaan, berdasarkan politik kolonialnya selalu diikuti dengan perjanjian di antara kedua belah pihak. Sama halnya dengan Cirebon, pada akhir tahun 1680 VOC melakukan pendekatan kepada tiga Pangeran Cirebon supaya mau mengakui VOC sebagai sekutu Cirebon. Akhirnya, mau tidak mau dan suka tidak suka ketiga Pangeran Cirebon menerima keinginan VOC yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara VOC dengan tiga pangeran Cirebon pada tanggal 7 Januari 1681. Seketika itu Cirebon resmi berada dalam pengaruh serta kekuasaan VOC baik dalam urusan pemerintahan ataupun kegiatan ekonominya.¹⁴

Jacob van Dyck pada bulan September tahun 1680 diutus sebagai seorang Komissaris ke Cirebon untuk menyerahkan surat keputusan. Pemerintahan Tertinggi Belanda pada tahun 1680 sudah menganggap Cirebon sebagai “Raja-raja Bebas” di bawah perlindungan VOC. Di sisi lain, Gubernur Jenderal dan para

¹³ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 196-197

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 197-198

Dewan Penasehat sudah menyusun suatu teks perjanjian yang akan diserahkan kepada tiga Pangeran Cirebon. Orang yang menyusun teks perjanjian adalah Speelman, dan pada akhir tahun 1680 Pemerintahan Tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian tersebut. Kemudian pada saat tahun baru 1681, tujuh orang utusan dari tiga Pangeran Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan. Upacara ini sebagai bentuk ucapan selamat di rumah Ryckloff van Goens (Gubernur Jenderal) dipimpin oleh Jacob van Dyck. Dalam *Uit Cheribon's Geschiedenis* yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia disebutkan: “setelah bersulang dengan segelas anggur Spanyol untuk keselamatan Raja Belanda, maka diserahkan surat keputusan Pemerintah Tertinggi Belanda kepada ketiga Pangeran Bersaudara disertai dengan hadiah-hadiah untuk mereka dan atasan mereka.”¹⁵

Ketika malam menjelang, Jacob van Dyck berlayar menuju Cirebon dengan suatu armada yang terdiri dari dua buah kapal. Armada tersebut diikuti oleh perahu-perahu Cirebon dari pantai Batavia dengan membawa para utusan Cirebon. Mereka tiba empat hari kemudian di pelabuhan Cirebon dan disambut dengan tembakan meriam sebagai bentuk pemberitahuan. Maka Kapten Jochem Michielse dan beberapa pembesar asal Makasar naik ke kapal menyambut kedatangan armada VOC. Esoknya diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para pembesar Cirebon di alun-alun atau paseban dengan disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian surat dibacakan dan besoknya dilanjutkan dengan perundingan serta pada malam harinya telah dicapai kesepakatan untuk memberlakukan kontrak perjanjian tersebut. Lalu pada tanggal 7 Januari 1681 dilakukanlah penandatanganan kontrak perjanjian antara tiga Pangeran Cirebon dengan VOC yang diwakili oleh Jacob van Dyck dan Jochem Michielse, VOC sebagai pihak pertama dan tiga Pangeran Cirebon (Raja Bersaudara dari Cirebon) sebagai pihak kedua.¹⁶

Berdasarkan arsip Perjanjian 7 Januari 1681, perjanjian ini bertujuan untuk membuat suatu ikatan yang kokoh, damai, persahabatan dan bertetangga yang baik antara VOC dengan Raja Bersaudara Cirebon. Selain ditandatangani oleh raja bersaudara yang diwakili oleh pangeran tertua (Martawijaya), perjanjian ini pun disetujui oleh enam pejabat tinggi Cirebon yaitu Raksanegara, Angga Deraksa, Purbanegara, Angga Deprana, Anggaraksa, dan Nataparti. Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Belanda, Melayu dan Bahasa Maleander. Setelah ditandatangani,

¹⁵ E.C. Godee Molsbergen, 2009, *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm. 4

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5

kontrak perjanjian dibubuhkan cap dan disumpah dengan Al-Qur'an sesuai dengan adat yang berlaku. Kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat yang sudah berkumpul di alun-alun atau paseban oleh ketiga Pangeran Cirebon.

Perjanjian 7 Januari 1681 menjadi tanda resmi beralihnya Cirebon di bawah pengaruh Banten menjadi di bawah kekuasaan VOC. Banyak hal yang harus ditunaikan dan menjadi resiko yang harus diambil oleh Cirebon. Nyatanya, perjanjian yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan di Cirebon, khususnya mengenai kekuasaan ketiga pangeran Cirebon tidak menyelesaikan apa pun. Permasalahan demi permasalahan terus dialami dan terus membuka celah bagi VOC untuk lebih dalam lagi menanamkan pengaruhnya di Cirebon. Maka sampai beberapa tahun kemudian, perjanjian pertama ini (Perjanjian 7 Januari 1681) terus diikuti dengan perjanjian-perjanjian berikutnya. Tentunya lewat setiap perjanjian membawa implikasinya bagi kehidupan di Kerajaan Cirebon.

IMPLIKASI PERJANJIAN 7 JANUARI 1681 DI KERAJAAN CIREBON

A. Melemahnya Kekuasaan Politik di Kerajaan Cirebon

Merujuk pada arsip Perjanjian 7 Januari 1681¹⁷, perjanjian yang telah dilakukan tiga Pangeran dari Cirebon dengan VOC berimplikasi pada ketaatan penuh Cirebon kepada VOC dalam berbagai kebijakan yang akan dilakukan dan hal itu berarti Cirebon sudah tidak lagi menjadi kerajaan yang berdaulat. Jika VOC menghendaki sesuatu, maka Cirebon harus mematuhi serta memenuhi permintaan VOC. Sebaliknya jika Cirebon menginginkan sesuatu maka hal tersebut harus berdasarkan pada persetujuan VOC. Cirebon tidak lagi dapat berkehendak serta bertindak sesuai dengan kebutuhan juga kepentingannya, semuanya harus atas izin dan persetujuan atau saran-saran yang diberikan oleh VOC. Sebagai contoh jika sewaktu-waktu Cirebon berada dalam keadaan yang mendesak serta memerlukan bantuan, maka Cirebon harus meminta bantuan VOC dan siap mengganti biaya yang dikeluarkan VOC untuk bantuan tersebut.

Dalam Perjanjian 7 Januari 1681 terdapat poin-poin kesepakatan serta ada juga poin ancaman. Jika terjadi, ada seseorang dari pihak raja atau tiga Pangeran dari Cirebon melanggar peraturan dan merugikan persekutuan atau menghina VOC, maka mereka yang melakukan perbuatan itu tanpa perbedaan harus dihukum karena perbuatannya. Pemberian hukuman harus segera dilakukan tanpa ditunda atau dilepaskan. Hal ini juga berlaku apabila VOC mengganggu masyarakat Cirebon.

¹⁷ Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Selanjutnya dengan dilakukannya Perjanjian 7 Januari 1681 Cirebon tidak diperkenankan untuk melakukan perluasan wilayah. Jika Cirebon ingin memperluas wilayah kekuasaannya, maka hal tersebut haram dilakukan. Namun apabila ekspansi wilayah dikehendaki pula oleh VOC, maka melakukan perluasan wilayah merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian apabila dalam batas-batas yang tidak merugikan terjadi perselisihan kecil, maka akan diselesaikan melalui panitia tertentu dengan berpedoman pada persahabatan. Hal ini tidaklah mengherankan jika pada tahun-tahun selanjutnya, jika ada perselisihan di antara ketiga pangeran dari Cirebon maka akan diselesaikan dengan sebuah perjanjian. Tentu saja, pihak yang menjadi penengah adalah VOC. Dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan maka kekuasaan dan campur tangan VOC di Kerajaan Cirebon semakin tidak bisa dihindari.

Sekitar empat tahun setelah perjanjian pertama dilakukan, terjadi lagi konflik mengenai kedudukan di antara tiga Pangeran dari Cirebon. Lagi-lagi VOC kembali berperan sebagai penengah, kali ini dari pihak VOC diwakili oleh Francois Tack yang datang ke Cirebon sebagai utusan dari Gubernur Jenderal VOC. Perjanjian kedua ini dilaksanakan di Keraton Kasepuhan dan ditandatangani pada tanggal 4 Desember 1685, dari pihak Cirebon diwakili oleh Sultan Sepuh (Pangeran Martawijaya), Sultan Anom (Pangeran Kartawijaya), dan Panembahan Cirebon (Pangeran Wangsakerta). Mengenai kedudukan ketiga Pangeran dari Cirebon berdasarkan perjanjian tersebut diterangkan bahwa kedudukan di antara mereka bertiga diputuskan secara urutan tingkatan (hierarki). Sultan Sepuh berada pada urutan pertama, Sultan Anom berada pada urutan kedua, dan Panembahan Cirebon berada pada urutan ketiga.¹⁸

Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa dalam melakukan tugas pemerintahan setiap pangeran tidak menciptakan perintah sendiri-sendiri, akan tetapi harus bermusyawarah dengan *mantri* bawahan masing-masing. Hal ini berarti dalam melakukan tugas pemerintahan setiap pangeran ditolong oleh beberapa *mantri*. Sultan Sepuh ditolong oleh tiga orang *mantri*, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon masing-masing ditolong oleh dua orang *mantri*. Ketujuh orang *mantri* itu disebut dengan *mantri pepitu* atau *jaksa pepitu*. Dalam sumber lain disebutkan bahwa *mantri* yang membantu pemerintahan tidak selalu berjumlah tujuh orang, namun bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan para pejabat tinggi harus berpatokan pada undang-undang (*pepakem*) yakni *Pepakem Nitih* (undang-undang yang mengatur

¹⁸ A.Sobana Hardjasaputra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 109-110

urusan sosial) dan *pepakem* (undang-undang yang mengatur urusan perdata dan pidana).¹⁹

Pada tahun 1686 berdasarkan rapat yang dilakukan Pemerintahan Tertinggi Belanda pada tanggal 8 Maret 1686 didirikan sebuah benteng di Cirebon. Gubernur Jenderal VOC atas usul dari komissaris Francois Tack memerintahkan pembangunan sebuah benteng yang dinamai *De Beschermingh* (Pelindung). Benteng ini dibuat dengan bentuk persegi empat dengan dua titik lengkap dan dua titik tidak lengkap. Joan Camphuys merupakan Gubernur Jenderal VOC, dia orang pertama yang membubuhkan tanda tangannya. Dalam suatu batu peringatan terdapat tulisan yang berisi:

“Setelah tahun 1681 dengan bantuan Kompeni, maka beberapa wilayah telah dibebaskan dari para penjajah. Pula atas permohonan para penduduk pedesaan sendiri agar wilayah-wilayah tersebut dikuasai oleh Kompeni. Maka di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuys telah dibangun benteng ini.” Pelindung.²⁰

Sejak tahun tersebut di Cirebon terdapat sebuah benteng yang juga difungsikan sebagai loji (gudang) oleh VOC. Untuk merealisasikan pembangunan Benteng *De Beschermingh*, tembok *Kutha* Cirebon dihancurkan lalu diganti dengan benteng VOC. Selain digunakan sebagai loji, benteng ini pun dipakai sebagai tempat tinggal orang-orang Belanda hingga tahun 1835. Kemudian tidak difungsikan setelah benteng tersebut terbakar.²¹ Meskipun VOC bisa membangun sebuah benteng di Cirebon, akan tetapi berdasarkan perjanjian terdahulu, yaitu Perjanjian 7 Januari 1681 penguasa Cirebon (tiga pangeran dari Cirebon) tidak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 110

²⁰ Inskripsi pada batu peringatan tersebut ditulis dalam Bahasa Belanda. Tulisan tersebut adalah:

“*Nadat A° 1681 De Landen Door Hulp Van De Generale Nederlandse Compagne Van De Overheersers Bevryd En Dezelve Benevens De Dorpers Op Haer Versoek Onder Voorn Compagne Genomen Waeren Geworden. Soowerd Onder De Regeringh Van Den Gouv. Gen. Camphuys Gebouwt Dese Vestingh.*”
De Beschermingh.

Lihat E.C. Godee Molsbergen, 2009, *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm. 6-7. Dalam sumber lain yaitu buku Sejarah Tatar Sunda disebutkan bahwa benteng ini bernama *de Fortrese de Beschermingh* (Benteng Perlindungan). Pejabat VOC yang pertama menempati benteng tersebut adalah Marten Samson. Lihat Nina H. Lubis dkk, *Op.Cit.*, hlm. 270. Senada dengan buku Sejarah Tatar Sunda dalam buku Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas disebutkan bahwa Marten Samson adalah residen Cirebon yang bertugas pada tahun 1685 sampai tahun 1688. Lihat pula Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 144

²¹ Ahmad Hamam Rochani, 2008, *Babad Cirebon*, Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, hlm. 308

diperbolehkan untuk membuat benteng baik di sekitar perbatasan di darat maupun daerah pantai tanpa pemberitahuan maupun izin dari pihak VOC. Hal ini menunjukkan bahwa VOC lebih banyak mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut daripada pihak Cirebon, di sisi lain Cirebon telah dikendalikan kehidupannya oleh VOC.

Semenjak pengaruh VOC mulai tertanam di Cirebon yaitu sejak disepakatinya Perjanjian 7 Januari 1681, secara otomatis ada perwakilan pejabat VOC yang tinggal di Cirebon. Sejak tahun 1685 perwakilan pejabat VOC disebut dengan residen. Residen Cirebon kemudian tinggal di benteng pertahanan yang dibuat oleh VOC. Ia bertugas sebagai penghubung antara pemerintah tinggi VOC di Batavia dengan para penguasa pribumi. Selain itu, ia pun bertugas menangani perselisihan-perselisihan kecil terutama dalam urusan perpindahan penduduk. Lalu apabila terjadi perselisihan juga antara pangeran atau sultan, maka seorang residen harus bisa menyelesaikannya.²²

Kerajaan Cirebon pasca VOC berhasil menanamkan pengaruhnya, terlebih dalam hal kekuasaan membuat hak khusus seorang sultan seperti mulai menghilang. Di antara hak khusus seorang sultan ialah sistem turun temurun mewariskan tahta kepada keturunannya. Secara politis, hak khusus tersebut adalah otoritas sultan yang menyerupai hak prerogatif. Tradisi ini menjadi ciri khusus dalam sistem pemerintahan kerajaan. Pada tahun 1752, VOC menetapkan peraturan tentang pergantian sultan di Cirebon. Ketetapan ini harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan antara Cirebon dengan VOC. Secara umum ketetapan tersebut mencakup dua hal. Pertama, pergantian tahta berdasarkan warisan dari seorang ayah pada anak untuk setiap raja/sultan. Kedua, bila seorang raja/sultan wafat serta tidak mempunyai anak sebagai keturunan langsung (putera dari permaisuri), maka peranan dalam urusan pemerintahan serta penghasilan yang tadinya dimiliki oleh raja/sultan akan dibagi-bagikan di antara sultan-sultan yang lain. Kedua hal tersebut diputuskan berdasarkan pada persetujuan yang sudah ditetapkan oleh VOC.²³

Realisasi ketetapan VOC tersebut mempunyai arti bahwa putera mahkota yang memiliki hak mewarisi tahta ayahnya, bisa menjadi sultan apabila ia disetujui oleh pihak VOC. Meskipun telah memenuhi syarat untuk meneruskan tahta ayahnya namun apabila ia tidak disukai dan tidak sesuai dengan kepentingan VOC, maka gugurlah ia menjadi seorang sultan. Hal ini terjadi ketika wafatnya Pangeran Tajularifin (Sultan Sepuh III) pada tahun 1753. Timbullah kekisruhan setelah

²² Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 95-96

²³ A.Sobana Hardjasaputra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 120

wafatnya Sultan Sepuh III karena dipaksakannya sistem baru yang menetapkan bahwa suksesi kepemimpinan berdasarkan warisan dari ayah kepada anak masing-masing sultan diputuskan berdasarkan atas persetujuan VOC.²⁴ Kemudian pada tahun 1798 pun terjadi hal yang sama. Sebenarnya yang menjadi pengganti Sultan Anom IV adalah Pangeran Raja Kanoman (Pangeran Surianegara), akan tetapi yang dilantik menjadi sultan ialah Pangeran Surantaka. Pangeran Surianegara merupakan putera tertua sekaligus putera mahkota, sedangkan Pangeran Surantaka adalah putera Sultan Anom IV dari selir. Ironisnya lagi, Pangeran Surianegara juga dua adik kandungnya yaitu Pangeran Kabupaten dan Pangeran Lautan diusir dari keraton.²⁵

B. Campur Tangan VOC dalam Kebijakan Ekonomi

Dalam isi Perjanjian 7 Januari 1681 dapat diketahui monopoli yang dilakukan oleh VOC yaitu Cirebon hanya boleh menjual dan membeli barang-barang dari VOC. Selanjutnya komoditi utama dari Cirebon hanya boleh dijual kepada VOC. Komoditi utama Cirebon yaitu lada, tidak boleh dijual kepada siapa pun dan hanya bisa dijual kepada VOC sesuai harga pasar. Selain itu, implikasi berikutnya adalah tidak diberlakukan pembayaran bea cukai kepada barang-barang yang dibawa oleh VOC. Sebelum VOC berhasil menguasai Cirebon melalui Perjanjian 7 Januari 1681, siapa pun yang datang berdagang di Cirebon dikenakan pajak oleh syahbandar. Namun setelah perjanjian dilakukan, hal tersebut tidak berlaku bagi VOC. Semua barang-barang yang masuk ke Cirebon atau pun barang-barang yang diekspor kembali di seluruh wilayah Susuhunan Mataram tidak dibebankan pajak. Akan tetapi orang-orang selain VOC yang membawa barang masuk atau keluar Cirebon, mereka dikenakan pajak. Syahbandar dan siapa pun itu tidak memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut. Ia hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh VOC.

Akibat Perjanjian 7 Januari 1681 ini Raja Cirebon secara total tidak bisa ikut campur dalam hal perdagangan di negaranya. Berdasarkan pada isi perjanjian tersebut para pembeli, pemasok-pemasok kayu dan lain sebagainya yang berdagang dengan VOC, membeli barang-barang dari VOC dan menjualnya kembali di Cirebon harus membayar pajak kepada perwakilan VOC di Cirebon.²⁶ Tidak peduli jenis barang apa pun itu, termasuk kayu, garam, beras, gula dan sebagainya. Keuntungan yang besar dalam perdagangan adalah tujuan utama yang diinginkan

²⁴ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 201

²⁵ *Ibid.*, hlm. 121-122

²⁶ Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

oleh VOC. Di sisi lain, penduduk Cirebon dilarang untuk berlayar tanpa surat izin berlayar dari VOC. Surat izin berlayar tersebut dikeluarkan dari Batavia atau dari Residen VOC yang ada di Cirebon. Apabila pada suatu saat tidak ada petugas VOC, maka diusahakan agar raja tertualah (Pangeran Martawijaya) yang sudah mendapat surat kuasa dari VOC akan mengeluarkan surat izin berlayar tersebut.

Pada periode pertama tumbuhnya pengaruh VOC di Tatar Sunda (termasuk Cirebon), mereka masih mengupayakan eksploitasi tanaman-tanaman yang dibudidayakan pada sistem kebun. Sistem yang dipakai ialah sistem *leveransi* (penyerahan wajib), dan *kontingensi* (penyerahan kuota yang sudah ditentukan oleh VOC). Kedua sistem tersebut dibebankan kepada suatu wilayah berdasarkan pada penaklukan, perjanjian, atau kontrak. Tanaman pertanian yang dikenai aturan penyerahan wajib dan penyerahan kuota adalah beras, cengkih, pala, lada, nila, benang, kopi, dan gula. Lada menjadi tanaman kebun yang mempunyai kedudukan penting untuk perekonomian di Tatar Sunda. Kedudukan lada bagi wilayah Tatar Sunda dan Cirebon sama pentingnya dengan kedudukan cengkih serta pala bagi Maluku. Sejak awal, lada yang diproduksi dari kebun-kebun dijual kepada para pedagang India dan Cina baru kemudian sampai di tangan para pedagang Eropa setelah mereka mengetahui jalan laut menuju ke timur.²⁷

Sementara itu, VOC mulai mengembangkan komoditas perdagangan baru yang dianggap mempunyai prospek cerah bagi perekonomian Belanda. Komoditas perdagangan baru itu adalah pembudidayaan tebu. Dari pembudidayaan tersebut, VOC akan menghasilkan gula yang begitu laku di pasaran perdagangan Eropa. Pada awal perkembangannya pembudidayaan tebu hanya difokuskan di wilayah Batavia dan wilayah sekitarnya, yaitu Cirebon dan Banten. Di Cirebon tanaman tebu ditanam di tanah-tanah swasta yang penguasanya adalah tuan tanah. Sebagian dari mereka beretnis Cina, meskipun ada pula yang beretnis Eropa. VOC juga memberikan hak khusus kepada tuan tanah tersebut yang membuat kedudukan mereka bisa disebutkan sama dengan kedudukan para bupati. Berdasarkan plakat tahun 1750 telah ditentukan bahwa jumlah penggilingan tebu tidak boleh melebihi 88 buah. Penanaman tebu di luar Batavia dilakukan VOC dalam skala kecil. Oleh karena itu, penggilingan tebu di Cirebon hanya terdapat 5 buah saja. VOC memberikan hak khusus untuk wilayah sekitar Batavia agar menjaga kualitas tebu yang didatangkan dari daerah jangan sampai merugikan pabrik penggilingan yang berada di Batavia.²⁸

²⁷ Nina H. Lubis dkk, *Op.Cit.*, hlm. 299-300

²⁸ *Ibid.*, hlm. 304-305

Telah kita ketahui bahwa politik kolonial VOC dengan sistem pemerintahan tidak langsung itu memang sejalan dengan kepentingannya. Perubahan sistem tanam tanaman wajib dari sistem bebas ke sistem tanam paksa pada tahun 1723 berakibat pada beban orang pribumi menjadi lebih berat. Orang bumi adalah mereka yang memiliki tanah dan ada di bawah kekuasaan bupati. Berbagai upaya untuk menghindari beban berat tersebut salah satunya yaitu dengan adanya mobilitas penduduk. Banyak orang bumi meninggalkan kampung halaman mereka. Di samping itu, orang menumpang yang sebelumnya tidak dikenai wajib tanam karena bukan pemilik tanah, lalu mereka pun dikenakan peraturan tanam paksa tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak membuat hasil produksi menjadi besar, sebab semenjak dahulu orang bumi selalu menggunakan bantuan tenaga dari orang yang menumpang.²⁹

Dalam hal tenaga kerja untuk pembudidayaan serta pabrik penggilingan tebu didapat melalui program kerja wajib yang diberikan oleh penguasa lokal kepada para pemilik pembudidayaan dan pabrik penggilingan tebu. Pada awal abad ketujuh belas, tenaga kerja wajib yang digunakan berasal dari budak-budak belian dan orang-orang Cina. Menjelang abad kedelapan belas, tatkala orang-orang Cina sedikit demi sedikit mulai menguasai pembudidayaan tebu kebutuhan tenaga kerja wajib diperoleh dari pekerja-pekerja wajib yang didatangkan dari wilayah Priangan dan Cirebon. Jumlah pekerja wajib yang bekerja pada pembudidayaan tebu sekitar 80-70 orang. Mereka diawasi kira-kira oleh 5-6 orang Cina. Hal serupa terjadi juga pada penanaman wajib kopi yang mulai dibudidayakan pada akhir abad ketujuh belas.³⁰

Di Cirebon, pembudidayaan tebu dipraktikkan di dalam desa persewaan. Desa persewaan merupakan sebuah desa yang dikontrakkan oleh pemiliknya kepada orang Cina dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud desa persewaan adalah bukan saja wilayah desanya yang dikontrakkan namun juga penduduk yang berdiam di desa tersebut. Penggilingan tebu di Cirebon diupayakan pengadaannya oleh orang-orang Cina. Mereka mengontrak beberapa desa dalam jangka waktu tiga tahun serta mewajibkan semua penduduknya untuk menanam tebu. Proses pembudidayaan tebu semuanya wajib dilakukan oleh penduduk desa persewaan mulai dari penanaman, pemotongan, pengangkutan, dan pekerjaan di penggilingan. Para penduduk diberi upah oleh si penyewa desa berdasarkan pada banyak atau sedikitnya air tebu yang dihasilkan. Selanjutnya orang-orang Cina menyetorkan

²⁹ Sartono Kartodirdjo, 1987, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*, Jakarta : PT Gramedia, hlm. 244

³⁰ Nina H. Lubis dkk, *Op.Cit.*, hlm. 306

gula yang sudah diproduksi kepada VOC. Jumlah gula yang disetorkan dari Cirebon kepada VOC pada akhir abad kedelapan belas sebesar 50.000 pon.³¹

Setelah tahun 1700 banyak hasil-hasil produksi yang didatangkan dari Cirebon oleh VOC ke pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah penguasaannya. Di antara hasil-hasil produksi Cirebon adalah lada, benang-kapas, indigo, gula, dan kopi. Ekspor kopi pertama dari Cirebon terjadi pada tahun 1712.³² Senasib dengan produksi gula, kopi pun menjadi tanaman yang wajib dibudidayakan di Cirebon.

C. Kebebasan Manusia Cirebon yang Hilang

Salah satu implikasi dari Perjanjian 7 Januari 1681 terhadap kehidupan sosial di Kerajaan Cirebon adalah mengenai diberlakukannya surat jalan. Warga VOC dan penduduk yang datang ke Cirebon, mereka harus memperlihatkan surat jalannya kepada syahbandar dan residen VOC. Penduduk Cirebon dilarang untuk berlayar tanpa surat izin berlayar dari VOC yang dikeluarkan dari Batavia atau dari residen VOC di Cirebon. Jika pada suatu waktu tidak ada petugas VOC, yang akan mewakili adalah raja tertualah (Pangeran Martawijaya/Sultan Sepuh) yang sudah mendapat surat kuasa dari VOC. Dialah yang akan mengeluarkan surat izin untuk berlayar. Dengan catatan, agar mereka tidak berlayar lebih jauh dari Pulau Bali dan tidak melewati Pulau Kalimantan.³³ Entah dengan tujuan untuk berdagang atau sekedar berlayar, penduduk Cirebon tidak diperkenankan berlayar melewati Pulau Kalimantan, mereka hanya boleh berlayar sejauh-jauhnya hanya mencapai Pulau Bali.

Pertumbuhan Kota Cirebon sebagai pusat pemerintahan dan sebagai kota pelabuhan dengan perkembangan fasilitas yang menyertainya berpengaruh pula pada corak kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya. Muncul lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga dan keahlian tertentu di antaranya pertukangan dan pengrajin. Produksi barang-barang dari bahan tanah liat (tembikar) pun ada, hingga sekarang produksi tersebut tetap lestari di daerah Panjunan. Di sisi lain terdapat kompleks atau tempat pembuat gong yang disebut daerah Pagongan. Berdasarkan hal tersebut terdapat kelompok masyarakat baru yang tidak hanya berprofesi sebagai nelayan ataupun petani saja. Di antara mereka juga ada orang-orang Cina yang ikut serta dalam meramaikan perdagangan di Cirebon.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 306-307

³² E.C. Godee Molsbergen, 2009, *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm. 9

³³ Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

³⁴ Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 151

Setelah VOC berhasil menduduki wilayah Cirebon, hubungan sosial di kalangan masyarakat pun berubah. Interaksi sosial tidak hanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari, namun juga terjadi ketika mereka melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan VOC. Seperti telah diketahui mengenai ketentuan penanaman wajib untuk produksi gula dan kopi di Cirebon, di situ jugalah terjadi hubungan sosial di antara masyarakat. Di sisi lain, rakyat pun diharuskan mengerjakan kerja rodi. VOC mewajibkan para penguasa pribumi menyetorkan tenaga kerja untuk kepentingan mereka. Para tenaga kerja tersebut diperas tenaganya untuk melakukan perbaikan jalan, pembuatan benteng (loji), dan lain-lain.³⁵

Selain itu, hubungan antara masyarakat dengan sultan serta perjabat tinggi kerajaan juga ikut berubah. Hubungan antara masyarakat dengan penguasa dalam pemerintahan berupa kerajaan berlangsung dengan ikatan feodal-tradisional yang telah mendarah daging menjadi sebuah tradisi. Kepemimpinan sultan lebih condong pada pola kepemimpinan tunggal yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Namun ketika VOC berhasil menguasai Cirebon melalui Perjanjian 7 Januari 1681, para sultan berada pada posisi yang lemah karena menjadi objek kepentingan VOC. Akibatnya hubungan yang terjadi antara masyarakat dengan sultannya terbatas hanya pada kegiatan yang berhubungan dengan acara keagamaan serta seni budaya, seperti pada hari raya Idul Fitri, muludan, panjang jimat, pertunjukan kesenian, dan lain-lain.³⁶

Sekitar tahun 1700an, Cirebon merupakan kota besar untuk masyarakat pribumi. Terdapat rumah-rumah dibuat dari bambu, namun ada juga yang dibuat dari papan ataupun batu. Rumah-rumah yang terbuat dari papan atau batu biasanya merupakan dalem para sultan dan ruang tamu pejabat VOC di dalam bentengnya.³⁷

Tahun 1722, seorang Belanda bernama Francois Valentijn berkunjung ke Cirebon. Ia menerangkan bahwa penduduk Cirebon berjumlah sekitar 7.000 keluarga. Apabila setiap keluarga dihitung rata-rata sekitar lima orang, maka jumlah penduduk di Kota Cirebon sekitar 35.000 orang. Tahun-tahun selanjutnya jumlah penduduk Kota Cirebon semakin bertambah. Misalnya pada tahun 1781, Nederburgh menaksir jumlah penduduk Kota Cirebon sekitar 90.000 orang. Oleh karena itu, dalam durasi waktu lima puluh sembilan tahun (1722-1781) penduduk Cirebon bertambah sekitar 55.000 orang atau sekitar 933 orang setiap tahunnya.³⁸

³⁵ A.Sobana Hardjasaputra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 122-123

³⁶ *Ibid.*, hlm. 124

³⁷ E.C. Godee Molsbergen, 2009, *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi, hlm. 8

³⁸ Nina H. Lubis dkk, *Op.Cit.*, hlm. 317

Adanya VOC dengan segenap pengaruhnya di Kerajaan Cirebon menimbulkan pro dan kontra di kalangan keluarga keraton. Di tengah ketidakberdayaan penguasa akibat Perjanjian 7 Januari 1681, membuat salah satu keluarga keraton bersuara atas situasi dan kondisi yang terjadi. Ia adalah Pangeran Kusumajaya yang merupakan saudara Sultan Sepuh dari isteri selirnya. Pangeran Kusumajaya dikenal sebagai sosok yang menggandrungi ajaran sufi. Ia mengkritik Sultan Sepuh dan Sultan Anom yang menghendaki peniruan pola perilaku, cara hidup dan infrastruktur asing yang dibawa oleh pejabat VOC. Kritik tersebut berimbas pada pengusiran Pangeran Kusumajaya dari lingkungan keraton. Kemudian Pangeran Kusumajaya melakukan pemberontakan, namun berhasil ditumpas oleh pihak keraton yang diboncengi oleh VOC. Adanya peristiwa ini menimbulkan pudarnya kharisma yang dimiliki keraton, situasi ini pun tidak disiasikan begitu saja oleh VOC.³⁹

Pada tahun 1702, VOC mengeluarkan sebuah peraturan baru. Hal ini dilatarbelakangi dengan timbulnya kesadaran dari VOC terhadap potensi para tokoh agama yang mungkin akan membuat kekacauan terhadap kekuasaan mereka. Fokus VOC juga tertuju pada lembaga pendidikan Islam yang berada di keraton atau yang berada dalam pengelolaan pihak keraton beserta keluarganya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu, VOC memutuskan untuk merontokkan fungsi tradisional keraton sebagai pusat studi agama Islam. Di samping itu VOC juga tidak memperbolehkan semua bentuk kegiatan belajar mengajar Agama Islam di keraton. Adanya larangan tersebut menandakan bahwa VOC ingin keraton hanya berfungsi sebagai rumah bagi penguasa lokal. Dengan demikian runtuh sudah legitimasi kerajaan yang sejak awal dibangun para pendiri Kerajaan Cirebon yaitu sebagai pusat studi dan dakwah Islam di wilayah Cirebon.⁴⁰

Sikap tidak suka terhadap berkuasanya VOC di Cirebon ditunjukkan juga oleh salah satu pejabat keraton. Dia adalah seorang *qadhi* di Kerajaan Cirebon juga seorang *da'i* Islam yang dikenal dengan nama Mbah Muqoyyim. Ia menanggalkan jabatannya di Kerajaan Cirebon kemudian keluar dari keraton. Kemudian ia membangun sebuah pesantren yang letaknya sejauh 12 Km dari pusat keraton. Wilayah yang dipilih Mbah Muqoyyim bernama Cimarati, Daun Sela di samping sungai yakni 500 meter sebelah utara dari Pondok Pesantren Buntet sekarang. Di sana, ia mengajarkan Agama Islam kepada para santrinya. Selain itu, ia pun

³⁹ Didin Nurul Rosidin, 2014, *Ulama Paska Sunan Gunung Jati: Studi Atas Sejarah dan Jaringan Intelektual Islam Cirebon (Abad 16-18)*, Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hlm. 62

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 62-63

mengajarkan ilmu ketatanegaraan yang merupakan salah satu keahliannya. Pengajaran yang diberikan Mbah Muqoyim membuat para santri juga masyarakat di sekitarnya sadar dengan kondisi yang terjadi akibat penguasaan VOC yang kemudian berlanjut dengan penjajahan oleh pemerintahan Belanda.⁴¹

Keberadaan VOC di Cirebon dengan segala kebijakannya membuat penderitaan di tengah masyarakat. Adanya kewajiban kerja rodi bagi kepentingan VOC maupun penguasa setempat, ditambah juga bagi kepentingan orang-orang Cina membuat masyarakat kesusahan dan menderita. Tenaga serta waktu yang dimiliki masyarakat habis tersita. Ketika ada kebijakan desa persewaan, banyak sekali desa yang disewakan berikud penduduknya kepada orang-orang Cina. Ditambah lagi berbagai pajak yang harus dibayar masyarakat. Semua itu membuat masyarakat yang susah semakin susah, banyak masyarakat yang tidak sanggup memenuhinya sehingga mereka selalu dikejar-kejar bahkan sampai dibunuh.⁴²

Kesusahan akibat kerja rodi ditambah lagi dengan terjadinya kelaparan, wabah penyakit, dan emigrasi penduduk khususnya di abad kedelapan belas. Kelaparan terjadi karena banyak faktor di antaranya padi/beras yang dimonopoli oleh VOC, lahan untuk menanam padi semakin berkurang karena adanya kebijakan tanam tanaman wajib seperti untuk produksi gula dan kopi, serta waktu masyarakat sudah habis untuk kerja wajib sehingga tidak ada waktu untuk menanam padi dan palawija. Tanah-tanah desa dikontrakkan kepada orang-orang Cina khususnya di wilayah Palimanan dan sekitarnya. Semua penderitaan tersebut membuat ekonomi masyarakat semakin terpuruk. Di sisi lain merebaknya wabah penyakit disebabkan oleh kondisi kota yang tidak sehat. Banyak sampah dibiarkan membusuk dan kanal-kanal mengering sehingga menimbulkan genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Kondisi tersebut terjadi khususnya di sekitar pelabuhan. Bisa jadi perpindahan penduduk ke daerah lain dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.⁴³ Dalam sumber lain disebutkan bahwa tahun-tahun bencana kelaparan dan wabah penyakit terjadi pada tahun 1719, 1721, 1729, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1779, dan 1812.⁴⁴

Sepanjang VOC berkuasa di Cirebon selama itu juga raja beserta rakyatnya bekerja dan mengabdikan untuk VOC. Ditandatangani Perjanjian 7 Januari 1681

⁴¹ Nuril Lizah, 2012, *Perjuangan Mbah Muqoyyim (1689-1750) dalam Menyebarkan Agama Islam di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*, Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: Tidak Diterbitkan, hlm. 53-55

⁴² Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, *Op.Cit.*, hlm. 202

⁴³ A.Sobana Hardjasaputra dkk, *Op.Cit.*, hlm. 126-128

⁴⁴ Zaenal Masduqi, *Op.Cit.*, hlm. 31

ternyata membawa implikasi pada kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial di Kerajaan Cirebon. Implikasi tersebut kebanyakan membawa kesengsaraan bagi rakyat, namun dari beberapa sisi masyarakat belajar dari perubahan-perubahan yang terjadi.

Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Keputusan VOC dibubarkan dikarenakan berbagai penyebab. Pertama, sifat VOC sebagai organisasi dagang untuk memerintah wilayah yang luas sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kedua, terjadi korupsi di tubuh VOC. Ketiga, terjadinya persaingan berat dengan kongsi-kongsi dagang negara lain. Keempat, VOC terus menerus terlibat peperangan sehingga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Terakhir, banyak terjadi bentrokan dan penyelundupan karena terlalu lama mempertahankan monopoli.⁴⁵ Sejak saat itu secara hukum VOC sudah tidak lagi berkuasa di Cirebon, namun pengaruhnya masih tetap terasa dan terus berlanjut hingga kekuasaan beralih pada pemerintah Hindia-Belanda.

KESIMPULAN

Perjanjian 7 Januari 1681 adalah sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani pada tanggal 7 Januari 1681 di Kerajaan Cirebon. Perjanjian tersebut dilakukan antara tiga pangeran dari Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta (ketiganya merupakan putera dari Panembahan Girilaya) dengan VOC. Perjanjian ini dilatar belakangi karena perebutan kekuasaan di antara ketiga pangeran, untuk meredam terjadinya konflik maka disepakatilah sebuah perjanjian. Versi lain menyebutkan bahwa perjanjian ini dilakukan karena Cirebon bersama Banten hendak menyerang Sumedang, kemudian pihak Sumedang meminta bantuan kepada VOC. Setelah itu VOC mengirim utusannya ke Cirebon untuk mengadakan kesepakatan-kesepakatan melalui sebuah perjanjian. Perjanjian ataupun kontrak merupakan salah satu cara VOC untuk menanamkan pengaruhnya terhadap suatu wilayah.

Perjanjian 7 Januari 1681 berimplikasi pada semua lini kehidupan di Kerajaan Cirebon. Implikasi perjanjian tersebut lebih terasa pada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Kerajaan Cirebon. Bidang-bidang kehidupan tersebut setelah dilakukannya perjanjian menjadi berubah. Implikasi dalam kehidupan politik ditandai dengan melemahnya kekuasaan politik di Kerajaan Cirebon. VOC selalu ikut campur dalam setiap kebijakan dan terus menerus mempersempit kekuasaan para Sultan Cirebon. Selanjutnya dalam kehidupan ekonomi, VOC selalu campur tangan dalam setiap kebijakan ekonomi yang tujuannya untuk

⁴⁵ G. Moedjanto, *Op.Cit.*, hlm. 17

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kebebasan dasar manusia Cirebon menjadi hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Naskah Perjanjian 7 Januari 1681. Sumber: Arsip Cirebon No 38.3, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Buku

Atja. 1986. *Carita Purwaka Caruban Nagari Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.

Hardjasaputra, A.Sobana, dkk. 2011. *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

Iskandar, Yoseph dkk. 2000. *Negara Gheng Islam Pakungwati Cirebon*. Bandung: Padepokan Sapta Rengga.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta : PT Gramedia.

Lubis, Nina H., dkk. 1956. *Sejarah Tatar Sunda Jilid 1*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Masduqi, Zaenal. 2011. *Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*. Cirebon: Nurjati Press.

Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.

Molsbergen, E.C. Godee. 2009. *Uit Cheribon's Geschiedenis*, diterjemahkan oleh Iwan Satibi.

Rochani, Ahmad Hamam. 2008. *Babad Cirebon*. Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

Skripsi & Laporan Penelitian

Lizah, Nuril. 2012. *Perjuangan Mbah Muqoyyim (1689-1750) dalam Menyebarkan Agama Islam di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten*

- Cirebon*. Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Cirebon: Tidak Diterbitkan.
- Rosidin, Didin Nurul. 2014. *Ulama Paska Sunan Gunung Jati: Studi Atas Sejarah dan Jaringan Intelektual Islam Cirebon (Abad 16-18)*. Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*. Bandung: Pemda Tingkat I Provinsi Jawa Barat.

